



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Parsaoran Sibisa)

Ratih S. Panjaitan, Arthur Simanjuntak, Yosephine N. Sembiring, Septony Benyamin Siahaan

Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2022

Disetujui Juni 2022

Dipublikasikan Juni 2022

Keywords:

Organizational Commitment; Government Internal Control System; Human Resource Competence; Accrual-Based Government Accounting Standards

Abstract

This study aims to determine the effect of apparatus competence, community participation, use of information technology, organizational commitment of village government, transparency and internal control systems on the accountability of Village Fund management in Motung, Pardomuan Motung and Parsaoran Sibisa Villages. This type of research is causal associative research with a qualitative approach. This research was conducted in Motung Village, Pardomuan Motung, Parsaoran Sibisa located in Ajibata District, Toba Regency, North Sumatra Province. The population and samples in this study were 31 people who were 10 officials each in Motung Village, 11 people in Pardomuan Motung Village, 10 Parsaoran Sibisa People. This study uses primary data obtained using a questionnaire. While the data analysis method used in this study is the method of multiple linear regression analysis carried out with the help of SPSS 25 software. The results in this study found that the utilization of information technology, transparency and internal control systems had a positive significant influence on village fund management accountability. While the competence of the apparatus, community participation and commitment of village government organizations, do not have a significant influence on the accountability of village fund management.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia saat ini mengutamakan desa sebagai tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan proses ini adalah dengan mendanai desa. Pendanaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Sugiarti & Yudinato, 2017).

Setiap desa memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengarahkan pemerintahannya sendiri. Kewenangan ini disebut desentralisasi. Ini merupakan bentuk pemerintahan yang disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa.

Desa adalah salah satu penyelenggara kegiatan pembangunan desa. Desa adalah unit pemerintahan yang terkecil, dan meskipun desa merupakan pemerintah terkecil, sudah saatnya berperan membangun desa yang cukup besar, namun dari segi pembangunan tidak boleh ketinggalan (Simanjuntak et al., 2020). Dengan kemajuan yang semakin tinggi sudah waktunya bagi desa untuk berkembang. Desa diharapkan tidak hanya menggerakkan masyarakat dari sisi pembangunan, tetapi juga membantu melakukan kinerja pengelolaan dan anggaran dana desa dengan baik sesuai dengan regulasi yang terkoordinasi. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, pengelolaan keuangan desa harus dikelola sesuai dengan peraturan dan prinsip pemerintah yang baik dimana pengelolaan keuangan anggaran harus akuntabel, transparan dan teratur.

Berkaitan dengan dana desa khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, fenomena menarik terjadi pada Kecamatan Ajibata, Kab.Toba, Provinsi Sumatera Utara. Berikut rincian dana desa yang dimiliki desa di Kecamatan Ajibata, Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Di Desa Motung, Pandomuan Motung, Parsaoran Sibisa

Desa	Anggaran Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Selisih
Motung	1.011.339.850	901.492.089	10,89%
Pandomuan Motung	1.094.900.375	948.280.434	13,39%
Parsaoran Sibisa	1.148.758.451	1.044.392.105	9,08%

Sumber: Kantor Desa Motung, Pandomuan Motung dan Parsaoran Sibisa Tahun 2021

Diketahui bahwa dana desa yang terdapat pada Desa Motung, Pandomuan Motung, Parsaoran Sibisa dalam realisasi masih terdapat selisih yang merupakan sisa anggaran dana desa yaitu 10,89%, 13,39% dan 9,08%. Sisa dana desa ini merupakan sisa anggaran dana desa yang tidak dipergunakan oleh desa dalam periode 2021.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) lebih lanjut menjelaskan bahwa desa yang dana desanya lebih dari 30% berada di RKD (rekening keuangan desa), pemerintah/walikota dapat menunda penyaluran dana desa terhadap dana desa yang tersisa dalam RKD untuk tahun anggaran sebelumnya. Apabila pada bulan Agustus tahun ini keuangan desa sisa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih melebihi besar dari 30% maka penyaluran keuangan desa yang ditunda dan tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa RKUD. Sisa dana terkait tidak dapat didistribusikan kembali

pada tahun anggaran berikutnya (<https://djpb.kemenkeu.go.id>). Disisi lain dengan adanya fenomena mengenai dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung, Parsaoran Sibisa menunjukkan bahwa pelaksanaan realisasi dana desa belum dilakukan secara maksimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah jenis teori yang menggunakan pendekatan perilaku yang banyak digunakan untuk mempelajari proses adopsi teknologi informasi. Namun, model yang baik seharusnya tidak hanya dapat diprediksi, tetapi idealnya dapat dijelaskan. *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan model yang mengadopsi teori perilaku rasional yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). TAM adalah model yang menghubungkan keyakinan kognitif, sikap, dan perilaku mereka yang terlibat dalam adopsi teknologi. Selain itu, TAM digunakan untuk menjelaskan perilaku individu penerima teknologi informasi.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan kegunaan adalah penentu paling penting dari penggunaan teknologi. TAM dikenal sebagai model yang kuat untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan individu teknologi. Dengan landasan teori yang kuat dari pengenalan TRA, Davis mengembangkan model TAM pada tahun 1986. TAM merupakan salah satu dari teori yang menggunakan pendekatan perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakan dalam penelitian dan adopsi teknologi informasi. Davis *et. al.*, (1989) menyatakan bahwa konsep *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah teori yang memberikan dasar untuk mempelajari dan memahami perilaku pengguna teknologi yang menerima dan menggunakan teknologi yang disediakan. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. TAM memberikan alasan untuk memahami faktor-faktor yang mempertimbangkan penerimaan teknologi dalam suatu organisasi.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab atas berbagai program dalam tanggung jawabnya (Simanjuntak et al., 2020). Meningkatkan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas, meliputi pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas agen kepada prinsipal (Mardiasmo, 2009).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2000), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak dan berhak meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas mengandung elemen penting untuk melindungi nilai-nilai, misalnya, prediktabilitas, efisiensi, efektivitas, keandalan, dan sebagainya. Akuntabilitas tidak berwujud, tetapi konkret dan harus ditentukan melalui serangkaian mekanisme yang sangat spesifik yang perlu dipertimbangkan untuk kasus tersebut.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif (Spencer, 1993:9). Kompetensi secara umum diartikan sebagai kemampuan, keterampilan, dan kemampuan kompetensi yang dapat diperoleh melalui pembelajaran.

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46 A Tahun 2008 bahwa kompetensi adalah keahlian dan keistimewaan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas posisinya, sehingga pegawainya tersebut dapat melakukan kewajibannya secara efisien, efektif dan profesional. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang terdapat pada pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan kerja yang ada pada setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki seseorang dan setiap orang memiliki keterampilan yang berbeda-beda.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah adanya suatu keterlibatan yang dilakukan secara sadar dalam suatu kegiatan tertentu yaitu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Menurut Adi (2007), partisipasi masyarakat mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada di masyarakat, melakukan upaya untuk mengatasinya, dan memilih serta menentukan alternatif solusi untuk mengatasinya terdiri dari menilai perubahan yang terjadi. Menurut Soetrisno (1995), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai suatu rencana pembangunan yang dirancang dan ditetapkan untuk mendukung pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu bentuk teknologi yang berupa perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat muda (*useware*) yang dapat digunakan untuk menerima, mengirimkan, mengelola, menafsirkan, menyimpan, mengatur, dan menyimpan informasi yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan berbagai jenis data, serta teknologi yang menggunakan komputer sebagai alat kerja dan telekomunikasi. Menurut Murhada & Giap (2011), teknologi informasi adalah alat atau perangkat yang mendukung pekerjaan dengan menggunakan informasi dan melakukan tugas atau kewajiban yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi sangat berguna untuk manajemen sumber daya manusia dari organisasi yang mengoperasikan sistem informasi komputer terintegrasi yang menyediakan data dan informasi yang digunakan untuk merencanakan dan membuat keputusan tentang sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Komputer dapat mengolah data lebih efektif daripada manusia.
2. Komputer tidak pernah lelah membantu tugas manusia dalam memproses data dalam jumlah besar.
3. Komputer dapat menyimpan lebih banyak data.

Kekurangan teknologi sistem informasi adalah sebagai berikut:

1. Jika terjadi kesalahan saat memproses data, ini berakibat fatal bagi informasi yang disajikan.
2. Anda membutuhkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi dokumen penting Anda.
3. Menerapkan sistem informasi di instansi pemerintah membutuhkan banyak biaya.

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi adalah keadaan seorang karyawan yang memilih tujuan tertentu dari suatu organisasi atau institusi yang sesuai dengan pilihannya tanpa meminta orang lain untuk bekerja seperti yang dia lakukan (Robbins dan Judge, 2008). Inisiatif komitmen perusahaan memungkinkan karyawan untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Keterlibatan organisasi sama dengan budaya organisasi. Salah satu ciri budaya organisasi yang kuat adalah pengurangan jumlah pegawai, dengan tujuan tercapainya keselarasan antar pegawai dan membangun komitmen organisasi antar pegawai melalui budaya organisasi. Keterlibatan organisasi yang baik akan dilatarbelakangi dengan motivasi kinerja yang kuat, tetapi jika keterlibatan organisasi buruk maka akan menghasilkan kinerja yang buruk. Dengan kata lain, semakin tinggi keterlibatan, semakin baik kinerjanya.

Menurut Sopiah (2008:155), komitmen organisasi merupakan aspek penting dari perilaku yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen organisasi adalah untuk mengidentifikasi dan melibatkan orang-orang yang relatif kuat dalam organisasi. Partisipasi organisasi berarti bahwa anggota organisasi ingin mempertahankan keanggotaannya dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuannya. Menurut Robbins dan Judge (2008), komitmen organisasi adalah sejauh mana seorang karyawan ingin mendukung organisasi dan tujuan serta keanggotaannya agar percaya dan menerima tujuan dan sasaran organisasi.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang disajikan kepada individu atau masyarakat umum untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Pengelolaan pelaporan keuangan harus transparan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bentuk keterbukaan dan akuntabilitas kepada aparat desa dalam pengelolaan pelaporan keuangan. Cara yang bersih, jujur, dan transparan serta pemikiran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dan pemerintah yang benar akan berdampak baik.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 tahun 2017, transparansi dapat dikatakan jika memiliki keterbukaan dan informasi yang jelas serta memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai keuangan daerah, sedangkan menurut standar akuntansi pemerintah transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui secara terbuka mengenai laporan atau informasi keuangan. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat dianjurkan oleh pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses terpadu dari kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan memungkinkan tercapainya tujuan tersebut dengan baik (Mahmudi, 2011: 251). Terbentuknya sistem pengendalian intern yang baik dapat berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kerja dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan aparat desa. Sistem pengendalian intern ini memuat struktur organisasi, metode, dan sarana yang dikordinasikan di dalam perusahaan atau wewenang untuk mengamankan aset perusahaan atau wewenang tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan”. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

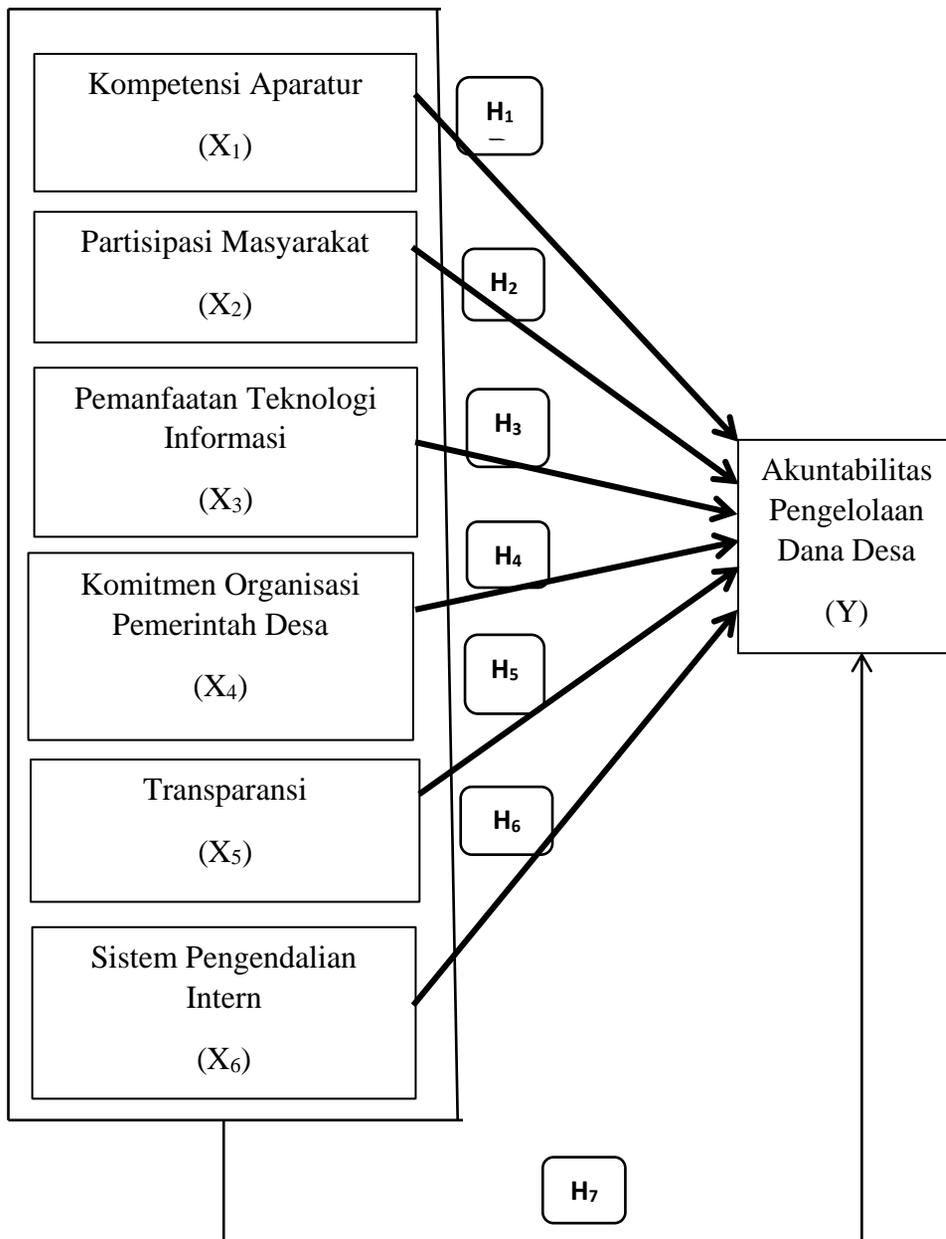
Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Secara teoretis, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pelaporan keuangan yang berkualitas tidak dapat dicapai tanpa adanya keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) (Ferina, 2016). Kompetensi adalah kata kompeten yang setara dengan pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan posisi yang dipercayakan kepada seseorang dan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kompeten juga berhubungan dengan keterampilan dimana seseorang yang kompeten harus bekerja dengan baik dan benar. Kompetensi sumber daya manusia sangat penting sebagai pengelola keuangan desa dimana kompetensi akan mempengaruhi akuntabilitas dari informasi laporan keuangan yang dihasilkan (Aziiz dan Prastiti, 2019).

Pentingnya kompetensi SDM agar terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seperti pada riset penelitian Mada, *et al.*, (2017); Ferina, *et al.*, (2016); Fajri (2015); Santi Suciningtyas dan Suropto (2019); Putri Aulia (2018); Taufan Taufik (2020), Devi Safitri (2020); dan Mahhalena Giriani, Neneng Dahtiah, Dian Imanina Burhany (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁: Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kerangka berpikir penelitian ini disajikan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai apabila masyarakat dilibatkan dalam penggunaannya dengan mengungkapkan segala ide dan kontribusinya terhadap pengelolaan dana desa yang ada. Mada, *et al*, (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Adi (2007) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berarti mengidentifikasi masalah dan kemungkinan yang ada di masyarakat,

memilih dan memutuskan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, melakukan upaya untuk mengatasi masalah, dan masyarakat. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam proses yang terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat sebagai salah satu dari metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Kim dan Schachter, 2013). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Makalalag (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2017); dan Aziz (2016) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.

H₂: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi digunakan untuk menghasilkan informasi *real-time*, memfasilitasi pelaporan dan pemantauan. Aulia (2018) secara umum menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi jumlah kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Penggunaan teknologi informasi berupa komputer dapat membantu aparat desa untuk mengelola semua dokumen desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan desa di suatu wilayah sudah baik, yang tercermin dari tersedianya komputer yang memadai di setiap desa. Komputer ini digunakan untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, yang dapat memungkinkan aparat desa memasukkan data lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Menggunakan komputer memiliki keunggulan dalam menentukan keakuratan dan hasil data karena dapat mengurangi kesalahan yang terjadi (Sugiarti & Yudianto, 2017). Hasil riset Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi adalah sejauh mana seorang individu percaya dan menerima tujuan organisasi dan ingin tinggal di organisasi. Orang yang merasa puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan, maka komitmen mereka terhadap organisasi atau lembaga akan sedikit lebih tinggi (Tarjo, 2019). Dalam keterlibatan organisasi, karyawan sangat tertarik pada tujuan, nilai, dan organisasi organisasi, dan keterlibatan dengan organisasi lebih dari sekadar keanggotaan formal. Hal ini mencakup sikap memiliki terhadap suatu organisasi dan berusaha mencapai tujuannya (Kusumastuti, 2014).

Hasil riset yang dilakukan oleh Mada, *et al.*, (2017) berhasil menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Astini (2020); dan Tarjo (2019) yang dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H4: Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah kebebasan untuk mengakses kegiatan politik dan ekonomi, membuat keputusan pemerintah, dan memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas untuk mempelajari dan mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dapat dibangun di atas arus informasi yang bebas yang dapat langsung diterima dan diterima oleh mereka yang membutuhkannya. Dalam kasus lain, masyarakat perlu mengetahui adanya sistem keterbukaan atau transparansi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi tentang keuangan dana desa (Hanifah dan Suci Indah, 2015). Hasil riset yang dilakukan oleh Rosyidi (2018) membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendratmi, *et al.*, (2017); dan Ramadan (2019) yang menyatakan bahwa teransparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

H5: Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Auntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem Pengendalian Intern atau yang disingkat dengan SPI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah .proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Semakin baik sistem pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil riset yang dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2017) berhasil membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula hasil penelitian Aziz dan Prastiti (2019); dan Atiningsih dan Ningtyas (2019) yang berhasil membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H6: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer serta metode koleksi data melalui teknik survei (Situmorang & Simanjuntak, 2021) dan (Situmorang & Simanjuntak, 2019). Survey dilakukan kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan dan kemudian melakukan pencocokan dengan indikator tiap variabel penelitian yang digunakan (Simanjuntak & Silitonga, 2020).

Sugiyono (2018:126) menjelaskan bahwa populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa yang terdapat di Desa Motung, Pardomuan Motung dan Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang berjumlah 31 orang. Menurut Sugiyono (2013), metode sampling jenuh adalah metode pengambilan total sampling atau keseluruhan orang pada populasi menjadi sampel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui validitas dari sebuah angket (Ghozali, 2018). Maka disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing indikator dan komposisi total masing-masing mengindikasikan validitas yang kuat dari tiap variabel dengan adanya data $r_{hitung} > r_{tabel}$, yaitu validitas item seluruh pernyataan dipastikan dan dapat digunakan.

4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti instrumen tersebut sudah baik sehingga cukup reliabel untuk digunakan sebagai instrumen akuisisi data. Pemeriksaan reliabilitas membantu menentukan konsistensi pengukuran variabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

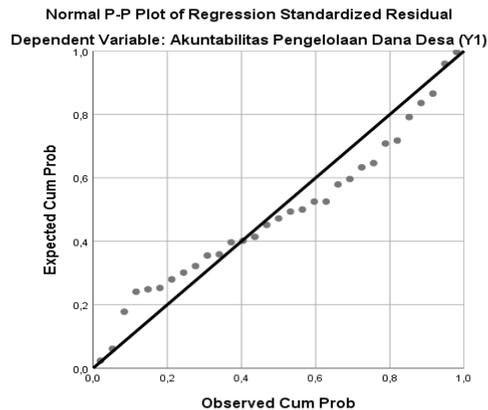
Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,932	Realiabel
Partisipasi Masyarakat	0,799	Realiabel
Pamanfaatan Teknologi Informasi	0,931	Realiabel
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	0,934	Realiabel
Transparansi	0,932	Realiabel
Sistem Pengendalian Intern	0,940	Realiabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,940	Realiabel

Data itu mengindikasikan yaitu koefisien alfa variabel sudah sesuai, atau bahwa setiap elemen konsep variabel memenuhi kriteria yang layak untuk digunakan sebagai ukuran.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk memungkinkan pengujian pada variabel terikat dan bebas dari penelitian terdistribusi dalam contoh regresi.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas dipastikan bahwa semua data mempunyai sebaran yang baik karena terletak pada titik linier. Maka dari itu dapat dilanjutkan untuk penelitian didasari oleh asumsi normalitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan relasi yang kuat dari variabel pada model regresi yang digunakan.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

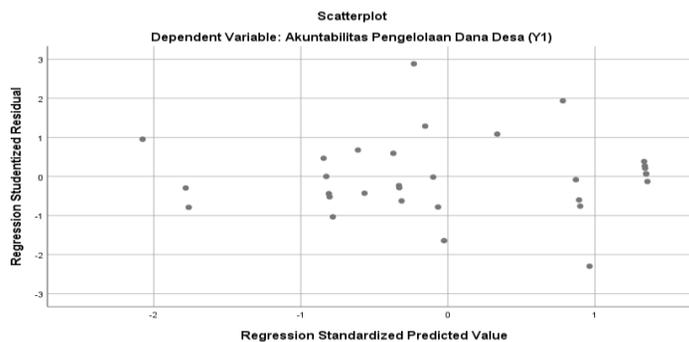
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompetensi Aparatur (X1)	,002	622,003
Partisipasi Masyarakat (X2)	,851	1,175
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	,133	7,539
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X4)	,207	4,824
Transparansi (X5)	,261	3,824
Sistem Pengendalian Intern (X6)	,126	7,950

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y1)

Dari tabel di atas dapat dilihat tidak terdapat gejala multikolinieritas pada interaksi variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi pemerintahan desa, transparansi dan sistem pengendalian intern.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghozali (2018) menjelaskan bahwa model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan analisis data dengan regresi linier menggunakan software SPSS versi 25. Persamaan yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$

Dimana:

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- X₁ : Kompetensi Aparatur
- X₂ : Partisipasi Masyarakat
- X₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi
- X₄ : Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
- X₅ : Transparansi
- X₆ : Sistem Pengendalian Intern
- a : Bilangan Konstanta
- β : Bilangan Koefisien
- e : *Error* yang ditolerir

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian ini diimplementasikan untuk memastikan pengaruh parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali,2018). Jika tingkat signifikansi merupakan hasil perhitungan, maka pengujian dilakukan dengan menguji tingkat signifikansi (p-value) < 0,05 dengan demikian hipotesis diterima. Tetapi apabila > 0,05 maka hipotesis tidak dapat diterima.

**Tabel 4. Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-.896	,503		-1,781	,088
	Kompetensi Aparatur (X1)	,003	,264	,003	,012	,990
	Partisipasi Masyarakat (X2)	,018	,018	,010	1,018	,319
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	,515	,087	,453	5,898	,000
	Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X4)	,369	,233	,307	1,580	,127
	Transparansi (X5)	,046	,019	,041	2,377	,026
	Sistem Pengendalian Intern (X6)	,186	,071	,207	2,632	,015

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y1)

1. Tingkat signifikansi untuk kompetensi aparatur adalah sebesar $0,990 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi sebesar $0,003$. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Tingkat signifikansi untuk partisipasi masyarakat adalah sebesar $0,319 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi sebesar $0,018$. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Tingkat signifikan untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar $0,000 < 0,05$ serta nilai koefisien regresi sebesar $0,515$. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Tingkat signifikansi untuk variabel komitmen organisasi pemerintah desa adalah sebesar $0,127 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi sebesar $0,369$. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Tingkat signifikansi untuk variabel transparansi adalah sebesar $0,026 < 0,05$ serta nilai koefisiens regresi sebesar $0,046$. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Tingkat signifikansi untuk variabel sistem pengendalian intern adalah sebesar $0,015 < 0,05$ serta nilai koefisiens regresi sebesar $0,186$. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji Statistik F Simultan

Jika hasil uji- F berpengaruh secara signifikan, maka dapat melanjutkan model regresi ini dengan melanjutkan uji-t (uji parsial). Dari sisi lain, uji tidak perlu dilakukan jika tidak semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (uji parsial). Hasil uji F bisa dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	512,586	6	85,431	2129,502	,000 ^b
	Residual	,963	24	,040		
	Total	513,548	30			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y1)

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (X6), Partisipasi Masyarakat (X2), Transparansi (X5), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X4), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Kompetensi Aparatur (X1)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Ini berarti hasil uji F menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi pemerintah desa, transparansi dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan. Untuk melihat variabel independen apa saja yang berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji t (uji parsial).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat (Ghozali, 2018). Nilai *Adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen yang terbatas. Sebaliknya nilai *Adjusted R²* yang besar berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat baik.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,999 ^a	,998	,998	,200

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (X6), Partisipasi Masyarakat (X2), Transparansi (X5), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X4), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Kompetensi Aparatur (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y1)

Berdasarkan Tabel 6, besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0.998 yang berarti sebesar 0.988 atau (98.0%) variabel independen yaitu kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi pemerintah desa,

transparansi dan sistem pengendalian intern mampu menjelaskan atau menggambarkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sisanya sebesar 2% dijelaskan atau digambarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung dan Parsaoran Sibisa. Variabel kompetensi aparatur menunjukkan nilai uji t_{hitung} sebesar 0,012 dan nilai signifikan sebesar 0,990 > dari tingkat signifikansi $alpha$ yang telah ditetapkan 5% (0,05). Dengan hasil tersebut maka H_1 atau hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung dan Parsaoran Sibisa. Variabel partisipasi masyarakat menunjukkan nilai uji t_{hitung} sebesar 1,018 dan nilai signifikan sebesar 0,319 lebih besar dari tingkat signifikansi $alpha$ yang telah ditetapkan 5% (0,05). Dengan hasil tersebut maka H_2 atau hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung dan Parsaoran Sibisa. Variabel partisipasi masyarakat menunjukkan nilai uji t_{hitung} sebesar 5,898 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi $alpha$ yang telah ditetapkan 5% (0,05). Dengan hasil tersebut maka H_3 atau hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **diterima**.

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintahan desa secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung dan Parsaoran Sibisa.

Variabel komitmen organisasi pemerintah desa menunjukkan nilai uji t_{hitung} sebesar 1,580 dan nilai signifikan sebesar 0,127 lebih besar dari tingkat signifikansi alpha yang telah ditetapkan 5% (0,05). Dengan hasil tersebut maka H_4 atau hipotesis yang menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **ditolak**.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung dan Parsaoran Sibisa. Variabel transparansi menunjukkan nilai uji t_{hitung} sebesar 2,377 dan nilai signifikan sebesar 0,026 lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha yang telah ditetapkan 5% (0,05). Dengan hasil tersebut maka H_5 atau hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **diterima**.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung dan Parsaoran Sibisa. Variabel sistem pengendalian intern menunjukkan nilai uji t_{hitung} sebesar 2,632 dan nilai signifikan sebesar 0,015 lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha yang telah ditetapkan 5% (0,05). Dengan hasil tersebut, maka H_6 atau hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **diterima**.

Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uji signifikan simultan (uji F) diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 2129,502 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi pemerintah desa, transparansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **diterima**.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung dan Parsaoran Sibisa.

2. Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung dan Parsaoran Sibisa.
3. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan dan Parsaoran Sibisa.
4. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung, dan Parsaoran Sibisa.
5. Transparansi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung, Parsaoran Sibisa.
6. Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Motung, Pardomuan Motung, Parsaoran Sibisa.
7. Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan sesuai dengan penelitian yaitu

1. Penelitian ini menggunakan data primer yang penelitian peroleh dengan menggunakan metode kuesioner, untuk lebih mendapatkan hasil yang sebenarnya diharapkan penelitian selanjutnya dapat merubah jenis data yaitu dengan menggunakan data sekunder yang berupa angka-angka yang lebih dapat diproses.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 desa yang telah peneliti tentukan di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yaitu Desa Motung, Pardomuan Motung, Parsaoran Sibisa, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti seluruh desa yang ada di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara agar penelitian dapat menggambarkan secara umum akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa yang ada di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti menggunakan variabel independen lain seperti motivasi kerja, partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengawasan dan sebagainya yang diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Fishbein, M, & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.

- Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi* Edisi ke 12, Jakarta: Salemba Empat.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumber Jurnal

- Amanda, D. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Mercu Buana.
- Aulia, Putri. 2018. “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota”. *JOM FEB*,1. Hal 3-7.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 10(1), 14-25.
- Aziiz, Muhammad Nur dan Sawitri Dwi Prastiti. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Journal Auntansi Aktual*.Vol.6, No. 2.
- Davis, Fren.D. 1989. ”Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”. *MIS Quarterly*.Vol. 13 No. 5: pp319-339.
- Giriani, Maghalena, Neneng Dahtiah & Dian Imanina Burhany. 2021. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*. Vol. 1 NO.3.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani*. 7 (2). 33-46.
- Made, Ni, Rita Sari & Kadek Dewi Padnyawati. 2021. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tababan, Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*. Volume 2, No 2.
- Martadinata, M. D. (2017) Pengaruh Good Governance, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Arilangga.

- Mudarosatun, N. I., (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa di Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Pancur Kab. Rembang). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sapartiningsih, *et al.*, 2018. “Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa”. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*. 14(1): 100-114.
- Santoso, E. B. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumberdaya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Tesis Ilmu Akuntansi*. Universitas Lampung.
- Sarah, siti, Taufeni Taufik, Devi Safitri. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume 4. No. 4.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Ut. *JURNAL MANAJEMEN Open*, 6(2), 129–138. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=AjAyyyn0AAAAJ&citation_for_view=AjAyyyn0AAAAJ:4T0pqqG69KYC
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat). *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.43>
- Simanjuntak, A., Situmorang, C. V., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 160. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2694>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2021). Pengaruh Strategic Management Accounting dalam Memediasi Pengaruh Orientasi Pasar, dan Kualitas Pimpinan terhadap Kinerja Keuangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 100–108. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.4312>

- Sugiarti, Ekasari, & Ivan Yudianto. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Padjadjaran. Sumedang.
- Widyatama, Arif., Lola. Novita dan Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 2 (2): 1-20.
- Wulandari, I. (2020) Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Penganggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. *Skrpsi*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Sumber Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2008 tentang *Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-perlakuan-bagi-desa-yang-mempunyai-sisa-dana-desa-tahun-sebelumnya-di-rkd-lebih-dari-30>